

PARADIGMA SIMBIOTIK AGAMA DAN NEGARA (STUDI PEMIKIRAN AHMAD SYAFI'I MAARIF)

Muhammad Wahdini

Magister Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
E-mail: muhammadwahdini99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini akan membahas peran epistemologi dalam membangun hukum Islam. Metode yang digunakan melalui kajian pustaka dari beberapa literatur pada studi filsafat hukum Islam. Studi ini menemukan bahwa metode istinbath dengan pendekatan maqashid al-Shari dapat menggabungkan dan memecahkan beberapa masalah hukum yang terjadi dalam konsep perdebatan. Metode ini dianggap efektif dalam mengembangkan konsep hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan zaman.

Kata kunci: epistemologi; hukum; ijtihad

Abstract

Discourse on religious and state relations is increasingly developing among Muslim intellectuals. Likewise the idea of returning Islamic law as a basic principle of statehood in Indonesia has begun to be re-discussed. Ahmad Syafi'i Maarif is one of the influential and phenomenal Muslim intellectual figures in Indonesia. The transformation of his thoughts on religion and the state became interesting, from a fundamental concept to a modernist moralist since he went to Chicago and studied with Fazlur Rahman. After the transformation, Syafi'i Maarif had a symbiotic paradigm about the relationship between religion and the state. Islam needs an instrument called the state. The state is needed to support religion. For Ahmad Syafi'i Maarif, the state is an important tool for religion. However, religion (Islam) does not have to or is the basis of the state.

Keywords: Symbiotic Paradigm, Ahmad Syafi'i Maarif, Religion, Country

PENDAHULUAN

Memori kolektif yang kuat di kalangan umat Islam, yaitu terdapatnya salah satu doktrin yang berbunyi *al-Islām huwa al-dīn wa 'l-dawlah*. Islam adalah agama dan sekaligus kekuasaan. Implikasi dari hubungan ini, antara agama dan negara, antara aspek ritual dan politik, sangat erat kaitannya, bahkan tidak bisa dipisahkan. Aspek hukum menyentuh ke semua aspek sosial politik. Sejak Nabi Muhammad sampai sekarang, kenangan tentang Madinah tempat

dimana Nabi mulai memetik kesuksesan dalam dakwah dan membangun masyarakatnya sangat kuat.¹

Dikalangan intelektual muslim sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Pertama* berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. *Kedua*, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. *Ketiga* menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.²

Sejarah ke-Indonesiaan telah mencatat, Menjelang diraihnya kemerdekaan, umat Islam baik fundamentalis maupun modernis, yang berada dalam BPUPKI berjuang agar Islam dijadikan dasar negara di Indonesia. Perjuangan ini merupakan bentuk kesungguhan dalam menjadikan Islam sebagai fondasi tertulis bagi kehidupan bernegara, yang didalamnya mengandung berbagai agama. Perjuangan nyata umat Islam adalah dengan mengemukakan kata syariat Islam dalam dasar negara. Dari seluruh anggota BPUPKI yang berjumlah 68 orang, ternyata hanya 15 orang saja yang benar-benar mewakili aspirasi politik Islam.³

Perdebatan tentang dasar negara melahirkan dua aliran politik, yaitu Islam dan aliran pemisahan antara negara dan agama, yang memiliki dasar pemikiran berbeda. Kelompok Islam berdalih bahwa dari seluruh ayat Al-Qur'an, hanya sekitar 600 ratus ayat

¹ Zaprul Khan Zaprul Khan, "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 105-132. Hlm.106

² Munawir Sjadzali, *Islam dan tata negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran* (Penerbit Universitas Indonesia, 1990).Hlm.9-10

³ Heni Wahyu Widayati, "Dialog Pemikiran tentang Islam dan Negara di Indonesia Masa Awal Kemerdekaan," *Jurnal Dakwah* 10, no. 2 (2009): 213-228. Hlm.215

yang berisi tentang kehidupan akhirat. Ini membuktikan bahwa Islam memperhatikan kehidupan dunia, maka Islam mestinya menjadi dasar bagi berdirinya Indonesia. Sementara itu kaum nasionalis berpendapat bahwa Indonesia memiliki keistimewaan khas, maka gagasan negara Islam harus ditolak. Isu tentang dasar negara ini menghadapkan para pendiri republik pada masa-masa sulit. Perdebatan tentang dasar negara Pancasila ternyata berkepanjangan hingga pertengahan tahun 1959. Sepanjang masa itu berarti telah terjadi konflik ideologis diantara para tokoh nasional bangsa kita dalam majelis konstituante, khususnya tentang usaha memasukkan kata syariat Islam dalam dasar negara seperti yang pernah dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Maka landasan pemikiran dua pihak antara kelompok nasionalis "sekuler" dan Islam.⁴

Keinginan sebagian kalangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara sesungguhnya bukanlah fenomena yang baru. Ia telah mencuat sejak Indonesia masih berumur belasan bulan, tepatnya ketika penentuan dasar negara. Akan tetapi, tuntutan yang didendangkan kelompok Islam tersebut kandas di tengah jalan lantaran mendapatkan resistensi dari kelompok nasionalis.⁵ Selain mendapatkan tantangan dan penolakan yang serius dari kelompok nasionalis, keinginan kelompok Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar bangsa dan formalisasi Syariat Islam juga mendapatkan resistensi yang luar biasa dari umat beragama non-Muslim, terutama kelompok Kristen.⁶

Sementara dalam konteks personal, terdapat banyak tokoh dan intelektual Islam Indonesia yang berkeberatan apabila Islam dijadikan dasar negara dan formalisasi Syariat Islam. Salah satunya adalah Ahmad Syafi'i Maarif. Sebagai salah satu intelektual Muslim terkemuka dan berpengaruh di Indonesia, tentu saja pandangan-pandangannya tentang relasi agama (Islam) dan negara menemukan momentumnya di saat bangsa ini banyak dibelit berbagai problematika, terutama terkait masalah ideologi negara.

⁴ Widayati.Hlm.216

⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan masalah kenegaraan: studi tentang percaturan dalam konstituante* (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1985). Hlm.101-110

⁶ Sigit Kamseno, "Komprensivisme Dîn al-Islâm: Kritik atas Konsep Kulturalisme dan Strukturalisme Islam," *dalam Jurnal Politik Islam* 1, no. 2 (2006): 1427.Hlm.164

Munculnya wacana baru untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk mengembalikan prinsip syariat islam dalam Pancasila, tentunya akan menjadi substansial untuk mengkaji pandangan dan pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif dalam menentang hal tersebut.

METODE

Penelitian yang dilakukan terhadap Pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif ini memerlukan identifikasi dan pemahaman yang mendalam untuk melihat konteks sejarah maupun kajian yang melingkupi permasalahan penelitian dan proses yang terjadi dalam literatur yang telah banyak ditulis. Oleh karena itu, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph A. Maxwell (1996:17-19), penelitian kualitatif antara lain ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi, serta memahami proses. Penelitian ini akan mengidentifikasi tentang konsepsi paradigma simbiotik hasil pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi jejak rekam latar belakang seorang Syafi'i Maarif. Selanjutnya, penelitian ini akan memberikan konklusi bagaimana pemikiran tersebut.

PEMBAHASAN

Biografi Ahmad Syafi'i Maarif

Ahmad Syafi'i Maarif terlahir sebagai anak kampung Calau, Sumpur Kudus, Sumatera Barat, lewat rahim seorang ibu yang bernama Fatiyah dari suku Chaniago pada tanggal 31 Mei 1935.⁷ Ayahnya adalah Datuk Rajo Melayu, seorang petinggi Nagari dari suku Melayu. Walaupun anak petinggi nagari, Maarif tidak berasal dari keluarga yang berlebih ekonominya. Saat Maarif menginjak usia delapan belas bulan, ibunya meninggal dunia. Sampai dengan hari ini dia tidak pernah tahu bagaimana raut wajah ibunya. Maarif dirawat dan dibesarkan oleh keluarga ayahnya, suatu hal yang tak biasa dalam tradisi Minangkabau. Seharusnya, Maarif dibesarkan

⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Titik-titik kisar di perjalananku: autobiografi Ahmad Syafii Maarif* (PT Mizan Publika, 2009).Hlm.20

oleh keluarga ibu karena sistem kekerabatan matrilineal. Maarif tidak memiliki posisi kultural yang kuat dalam keluarga sang ayah karena Dalam kehidupan masa kecilnya di surau, Maarif mengenal banyak hal mengenai Islam, tak terkecuali Muhammadiyah. Dari sini, perjalanan intelektual Maarif dimulai⁸.

Muhammadiyah menjadi tempat belajar satu-satunya karena pada masa revolusi institusi-institusi pendidikan milik negara tidak beroperasi. Dalam konteks ini, Muhammadiyah mengisi kekosongan tersebut lewat gerakan sosial-religiusnya sehingga gerakan ini sangat berkontribusi dalam penyelesaian persoalan masyarakat saat itu. Muhammadiyah berada pada konteks yang tepat untuk menyebarkan pengaruh.⁹

Pendidikan formal Syafi'i Maarif dimulai dari tingkat dasar yaitu Sekolah Rakyat (SR) dan Madrasah Ibtidaiyah Sumpur Kudus (lulus 1947), kemudian ia melanjutkan ke tingkat menengah pertama pada Madrasah Muallimin di Balai Tengah, Lintau, Sumatera Barat (1950-1953). Setelah itu, ia pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan menengahnya di Muallimin Muhammadiyah (lulus pada 1956).¹⁰ Setelah melewati masa kecilnya di desa yang bersahaja itu, Syafi'i Maarif melanglang buana. Pendidikan S1-nya dihabiskan di Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Solo, hingga memperoleh gelar sarjana muda. Setamat dari Fakultas Hukum, ia melanjutkan pendidikannya ke IKIP Yogyakarta, dan memperoleh gelar sarjana sejarah. Dalam upaya menekuni ilmu sejarahnya, Syafi'i Maarif mengikuti Program Master di Departemen Sejarah Universitas Ohio, AS. Sementara gelar doktornya diperoleh dari Program Studi Bahasa dan Peradaban Timur Dekat, Universitas Chicago, AS, dengan disertasi: *Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia*.¹¹

Dari sekian perjalanan intelektual-akademis yang dilakukan, Chicago merupakan pengalaman yang luar biasa memberikan

⁸ Maarif. Hlm. 29

⁹ Arie Putra, "Potret Intelektual Muslim: Sebuah Tinjauan Sosiologi Pengetahuan terhadap Pemikiran Ahmad Syafii Maarif," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 2014, 47-73. Hlm. 54

¹⁰ Ahmad Asroni, "Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Negara dan Syariat Islam di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum UII* 10, no. 2 (2011). Hlm. 359

¹¹ Damanhuri Damanhuri, "ISLAM, KEINDONESIAAN, DAN KEMANUSIAAN (TELAAH PEMIKIRAN AHMAD SYAFII MAARIF)," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2016). Hlm. 77-78

pengaruh pada pembentukan struktur berpikir Syafi'i, tentu setelah ia bertemu dengan Fazlur Rahman.¹² Dalam bahasa narasinya yang khas, beliau mengatakannya sebagai berikut:

*"Saya belajar Islam sudah mulai semenjak di Ibtidaiyah Muhammadiyah, tetapi menjadi sangat mantap setelah berguru pada Prof. Fazlur Rahman selama empat tahun di Chicago. Rahman mengenalkan kepada saya pesan universalisme al-Quran melalui beberapa mata kuliah yang saya ikuti, termasuk tafsir al-Quran yang diberikannya. Saya menjadi sangat kritis terhadap berbagai pemikiran Islam, baik yang klasik maupun yang modern, setelah belajar al-Quran pada Rahman. Oleh sebab itu ada baiknya bila seorang ingin mengenal pemikiran saya, mohon dibaca juga karya-karya Rahman, sekalipun saya tidak mungkin menyamai otoritas keilmuannya dalam soalsoal keislaman."*¹³

Diantara karya-karya hingga kini yang terdokumentasikan adalah sebagai berikut:

1. Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan (2009).
2. Menerobos Kemelut Refleksi Cendekiawan Muslim (2006).
3. Titik-Titik Kisar di Perjalanan Ku (2006).
4. Menggugah Nurani Bangsa (2005).
5. Mencari Autentitas dalam kegalauan (2004).
6. Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik (2000).
7. Islam dan Politik Membingkai Peradaban (1999).
8. Islam Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat (1997).
9. Keterkaitan antara Sejarah, Filsafat, dan Agama (1997).
10. Islam dan Politik; Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1996)
11. Muhammadiyah dalam Konteks Intelektual Muslim (Bandung: Mizan, 1995).
12. Membumikan Islam (1995).
13. Percik-Percik Pemikiran Iqbal (1994).
14. Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia (1994).
15. Islam dan Politik di Indonesia (1988).

¹² Damanhuri.Hlm.78

¹³ Maarif, *Titik-titik kisar di perjalananku*.Hlm.186-207

16. Al-Qur'an, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah (1985).
17. Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante (1985).
18. Dinamika Islam (1984).
19. Islam, Mengapa Tidak? (1984).
20. Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia dalam Aspirasi Umat Islam Indonesia (1983).
21. Mengapa Vietnam Jatuh Seluruhnya ke Tangan Komunis (1975).

Transformasi Pemikiran Syafi'i Maarif

Pembentukan intelektual Syafii Ma'arif terjadi ketika beliau belajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Balai Tangan, Lintau. Modal pendidikan di Muallimin, beliau berani berpidato didepan publik kampung yang jumlahnya terbatas, Juga mulai memberi ceramah ditempat-tempat lain. Modal pengetahuan yang masih sedikit itu beliau telah berani berdebat atau berargumen di mesjid menghadapi kaum elit sumpur kudus, topik perdebatan tidak jauh dari masalah-masalah khilafiyah kampung. Paham agama muhammadiyah yang menjadi modal dasar Syafii Ma'arif sejak Madrasah Ibtidaiyah Sumpur telah menjadi modal dasar hingga beliau mencapai puncak akademiknya.¹⁴

Pertumbuhan intelektual Syafi'i Maarif dimulai sejak beliau masuk ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Wawasannya semakin luas, tetapi wataknya sebagai seorang "fundamentalis" belum berubah. Bahkan sampai beliau belajar sejarah pada Universitas Ohio di Athens, Amerika Serikat. Faham agamanya belum banyak menemukan perubahan. Cita-cita politik Syafii Ma'arif masih saja ingin menaklukkan Indonesia agar menjadi Negara Islam, padahal batang usianya pada saat itu sudah di atas 40 tahun. Pada masa ini pola pikirnya terikat oleh konsep Masyumi versi maududi dan menjadikannya sebagai rujukan primer. Pada tahun 1976-1978 beliau aktif dalam MSA (*Muslim Student's Asosiation*) yang merindukan tegaknya negara islam.¹⁵

Perkembangan intelektual terjadi pada saat ia mengikuti program doktor di Universitas Chicago, Amerika Serikat, selesai

¹⁴ Maarif.hlm-96-100

¹⁵ Maarif.Hlm.195

tahun 1983. Di universitas tersebut, ia mengalami titik balik intelektual secara signifikan. Di bawah bimbingan Fazlur Rahman (1919-1988), Syafi'i Maarif memiliki pandangan yang realistis dan rasional tentang Islam ini.¹⁶

Setelah melalui titik kisar ketiga, ia memantapkan diri sebagai seorang pemikir Muslim yang intens mengkaji relasi antara Islam, Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut belakangan harus ia bayar mahal dengan sejumlah predikat yang terkesan peyoratif (mengejek), seperti: "hanya membebek pikiran Rahman", "pembawa sekularisme", "anti-Piagam Jakarta". Dengan keteguhan dan kematangan intelektual, hal itu tidak membuatnya terinterupsi untuk terus menyampaikan pemikiran-pemikirannya dalam perspektif sosiologis keindonesiaan.

Selain Fazlur Rahman, Mohammad Hatta turut memberikan pengaruh terhadap perkembangan intelektual Syafii Maarif. Dalam beberapa tulisannya, Syafi'i Maarif memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap pemikiran dan aktivisme Hatta. Syafi'i Maarif juga menyebut Hatta sebagai seorang moralis sejati. Darinya Syafi'i Maarif mendapatkan spirit di mana nilai-nilai moral mesti ditegakkan walaupun harus berhadapan dengan kekuasaan yang cukup kokoh. Selain itu, Syafii Maarif juga belajar bagaimana memahami Islam secara substansial. Hatta selalu menegaskan bahwa substansi nilai-nilai Islam yang dipraktikkan dalam kehidupan jauh lebih penting ketimbang mengedepankan sisi formal agama.¹⁷

Daya dobrak yang dihasilkan dari dinamika intelektual Syafi'i Maarif mendapatkan momentumnya setelah ia terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta. Jika ditelisik lebih jauh, intelektualisme Syafi'i Maarif tidak hanya sebatas gagasan-gagasan normatif, melainkan terwujud dalam aktivitasnya secara riil. Bahkan M. Amin Abdullah mensejajarkan sosok Maarif dengan Ali Syari'ati (1933- 1977), intelektual Iran itu. Abdullah beralasan bahwa sosok Syafii Maarif merupakan intelektual sekaligus aktivis pergerakan yang memiliki

¹⁶ François Raillon, "Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang percaturan dalam Konstituante," *Archipel* 33, no. 1 (1987): 216-217. Hlm. xiii

¹⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autensitas dalam Dinamika Zaman* (IRCiSoD, 2019). Hlm. 229-232

kapasitas sosial amat tinggi. Dengan perspektif ini, ia lebih tepat disebut intelektual organik. Namun demikian, perkembangan intelektualnya terbilang lambat. Ia mendapatkan gelar doktor di usia 48 tahun, kemudian meraih predikat Guru Besar Sejarah dari IKIP Yogyakarta di usia 62 tahun. Tentu saja, kenyataan itu wajar saja mengingat perjalanan hidupnya amat berliku.¹⁸

Paradigma Simbiotik Agama Dan Negara

Pasca transformasi pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif, sehingga beliau menggaungkan konsep pemikirannya tentang relasi agama dan negara adalah sebuah konsep yang integralistik. Ahmad Syafii Ma'arif dalam bukunya *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (2009), Mengemukakan empat hal yang menjadi kegalauannya, *pertama*, ia tidak rela bila bangsa ini tercabik-cabik oleh politik agama, kepentingan picik, lokal, dan primordialisme. *Kedua*, adanya kesenjangan antara ajaran dan praktek kehidupan, yaitu tiadanya korelasi antara praktek agama dan perbaikan moral. Di satu sisi, orang rajin beribadah, di sisi yang lain, korupsi semakin menggurita dan kekerasan menghancurkan bangsa ini. *Ketiga*, munculnya penyakit yang sifatnya kultural dan mental. Dan *keempat*, fenomena kemiskinan, dan kebodohan menimpa sebagian besar umat Muslim Indonesia.¹⁹

Berdasarkan kegelisahan tersebut dalam konteks relasi agama dan negara Ahmad Syafii Ma'arif mengemukakan secara doktrinal, Islam tidak menetapkan dan menegaskan pola apapun tentang teori negara Islam yang wajib digunakan oleh kaum Muslim. H.A.R. Gibb seperti dikutip Buya Ahmad Syafii Maarif, memaparkan bahwa baik Al-Qur'an maupun Sunnah tidak memberikan petunjuk yang tegas tentang bentuk pemerintahan dan lembaga-lembaga politik lainnya sebagai cara bagi umat untuk mempertahankan persatuannya.²⁰

¹⁸ Muhammad Qorib, "Ahmad Syafii Maarif: Kajian Sosial-intelektual dan Model Gagasan Keislamannya," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2017).Hlm.70

¹⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan: sebuah refleksi sejarah* (PT Mizan Publika, 2009).Hlm.116

²⁰ Maarif, *Islam dan masalah kenegaraan*.Hlm.20

Lebih lanjut, Terminologi “kerajaan Islam”, “kesultanan Islam” atau “monarkhi Islam” menurut Syafii Ma’arif sebenarnya bersifat kontradiktif di dalamnya. Monarkhi, kesultanan, dan seterusnya tidak secara otomatis dapat menjadi Islam kendatipun menggunakan embel-embel nama Islam. Ia juga mengkritik gagasan negara Islam. Menurutnya, gagasan negara Islam tidak memiliki basis religio-intelektual yang kukuh, yang berbicara secara teoretik. Terminologi negara Islam tidak ada dalam kepustakaan Islam klasik. Dalam Piagam Madinah pun, terminologi ini tidak ditemukan.²¹

Ahmad Syafi’i Maarif melakukan penafsiran yang universal dari ajaran-ajaran Al-Qur’an hingga semangat moralnya dapat diterima oleh berbagai kelompok dan juga agama. Visi pluralism baginya adalah sebuah keadaan dimana setiap orang dapat hidup bersama tnpa ketakutan, oleh karena itu Syafi’i ingin menafsirkan ajaran Islam sebagai kelompok yang mayoritas menjadi sesuatu yang universal agar dapat diterima dalam kelompok sekecil apapun. Dalam pandangan Syafi’i negara Islam adalah sebuah konsep yang akan menghasilkan ketakutan bagi kelompok minoritas karena semangatnya sangat partikular, sehingga menimbulkan ketakutan bagi yang minoritas terhadap ide tersebut. Syafi’i mengkonstruksi Islam sebagai ajaran yang universal, tokoh agama lain pun juga memposisikan agama seperti itu, dimana mereka juga mengkonstruksi ajarannya sebagai sebuah universal. Mereka menganggap dengan cara menjunjung tinggi penguniversalan lewat ide kemanusiaan.²²

Kehadiran demokrasi akan mempertegas nilai keagamaan mereka. Agama sebagai sebuah jalan untuk menyelesaikan persoalan, tidak seperti yang dituduhkan oleh kelompok sekuler yang memposisikan agama sebagai sumber konflik, agama bisa mengatakan bahwa merekalah yang aktual dalam kekacauan yang diciptakan sekulerisme. Ahmad Syafi’i Maarif menentang adanya ketidakadilan negara adalah sebuah perjalanan untuk semakin menghayati Islam, bukan hanya sebagai seorang yang menjunjung keadilan dan demokrasi. Selain itu yang menjadi kelebihan dari

²¹ Asroni, “Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Negara dan Syariat Islam di Indonesia.”Hlm.361

²² Ahmad Sholikin, “Pemikiran Politik Negara Dan Agama ‘Ahmad Syafii Maarif,’” *Universitas Airlangga*, 2013.Hlm.202

Syafi'i Maarif adalah Ia menjadi seorang agen yang pemikirannya dapat diterima sebagai produk pemikiran Islam. Melalui mobilisasi dalam hal pendidikan, Syafi'i memiliki pandangan yang dibangun oleh kultur akademisi yang penuh dengan pertanyaan terhadap suatu keyakinan dan memproduksi gagasan-gagasan yang lebih produktif dan bervariasi terhadap persoalan yang begitu dekat dengan masyarakat.²³

Metode lain yang digunakan oleh Syafi'i Maarif adalah melakukan pengkajian secara historis, Nabi Muhammad SAW merupakan pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Hal ini tampak ketika beliau menjadi pemimpin di Madinah. Beliau sendiri tidak pernah menyebut dirinya sebagai penguasa. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah mendeklarasikan sistem atau bentuk pemerintah yang baku yang harus dianut oleh umat Islam. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang visioner dan futuristik. Beliau memahami betul bahwa masyarakat Muslim adalah masyarakat yang pluralistik dan dinamis. Apabila hanya ada satu bentuk atau sistem pemerintahan yang harus diimani oleh umat Muslim, maka secara politis akan menyulitkan umat Islam itu nantinya. Sebab, umat Muslim di satu negara dengan negara yang lain memiliki mekanisme politik yang beragam.²⁴

Mekanisme politik yang beragam ini dapat disimak dari sejarah kepemimpinan *khulafa ar-râsyidîn*. Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Muslim mengalami krisis kepemimpinan. Fazlur Rahman sebagaimana dikutip Ahmad Syafii Maarif menyebutnya sebagai krisis konstitusional. Terlambatnya pemakaman jenazah nabi merupakan indikator akan gawatnya krisis kepemimpinan pada saat itu. Umat Islam mengalami kebingungan karena Nabi tidak meninggalkan pesan siapa pengganti beliau. Kemudian atas konsensus para petinggi Islam di Balai Banu Sa'idah, ditunjuklah Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Pertemuan di Balai Banu Sa'idah menurut Syafi'i Maarif menjadi titik tolak yang sangat penting dalam sejarah politik Islam pada periode awal. Pertemuan tersebut, kata Syafi'i Maarif, dapat

²³ Sholikin.

²⁴ Asroni, "Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Negara dan Syariat Islam di Indonesia."Hlm.363-364

dikatakan sebagai pelaksanaan *syûrâ* pertama di kalangan umat Muslim pasca wafatnya Nabi.²⁵

Saat pengangkatan Abu Bakar ini, muncul *clash of interest* antara mayoritas pemuka Islam dengan Ali bin Abi Thalib beserta pengikutnya. Ali dan kelompoknya mengklaim diri sebagai pemimpin yang paling berhak menggantikan nabi karena khilafah menurut mereka adalah *miraa un nubuwwah*, keluarga Nabi Muhammad SAW lebih berhak memperoleh miraa ini. Karena beberapa alasan, Ali disingkirkan dari percaturan politik dan mayoritas pemuka Islam lebih memilih Abu Bakar secara aklamasi sebagai khalifah.²⁶

Sepeninggal Abu Bakar, estafet kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Khattab melalui wasiat yang diberikan oleh Abu Bakar. Pasca Umar bin Khattab lengser keprabon, jabatan khalifah dikuasakan kepada Ustman bin Affan melalui tim formatur yang diprakarsai Umar. Pasca Ustman mangkat, posisi kekhalifahan dijabat oleh Ali melalui aklamasi. Periode keempat khalifah ini terkenal dengan sebutan *khulafa ar-râsyidîn*. Ketidakbakuan sistem kepemimpinan pada masa khalifah menandakan bahwa sistem khilafah muncul untuk merespons kondisi pada waktu itu dan sifatnya *ad hoc*.

Pasca periode *khulafa ar-râsyidîn*, terjadi transformasi yang sangat mendasar dalam sistem politik pada periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah. Berbeda dengan periode sahabat, sistem khilafah pada periode ini dijalankan secara dinasti oleh keluarga kerajaan. Singkatnya, sistem khilafah Islamiyah sempat eksis dan berkuasa selama kurang lebih 13 abad lamanya, terhitung sejak masa *khulafa ar-râsyidîn* pada 632 M hingga masa Turki Utsmani yang berakhir pada tahun 1924 M. Rentang waktu selama itu, tak dapat dipungkiri sistem khilafah pernah menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang dominan. Kalangan yang memimpikan formalisasi Syariat Islam kerap kali mengklaim semua model pemerintahan tersebut sebagai prototipe pemerintahan yang harus diadopsi sebagai sebuah “formula Islami”. Romantisme sejarah kejayaan Islam pada masa khalifah inilah salah satu yang melatar

²⁵ Maarif, *Islam dan masalah kenegaraan*.Hlm.19

²⁶ Jalaluddin Rakhmat, “Islam Alternatif, Ceramah-ceramah di Kampus, cet,” *Ketiga*. Jakarta: Penerbit Mizan 26 (2004).Hlm.250

belakangi sebagian kalangan Muslim untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara atau mendirikan negara Islam.²⁷

Menurut Ahmad Syafi'i Maarif, Islam tidak mempermasalahkan apapun nama dan bentuk pemerintahan, Islam hanya menekankan pentingnya moral-etik dalam kehidupan bernegara Al-Qur'an pada prinsipnya merupakan petunjuk etik bagi manusia, ia bukanlah kitab ilmu politik. Kedua, institusi-institusi sosio-politik dan organisasi manusia senantiasa berubah dari masa ke masa. Dengan kata lain, diamnya Al-Qur'an dalam masalah ini dapat diartikan bahwa Al-Qur'an memberikan suatu jaminan yang sangat esensial bagi manusia untuk mencari sistem yang tepat. Tujuan terpenting Al-Qur'an dan juga Islam adalah supaya nilai-nilai dan perintah-perintah etiknya dijunjung tinggi dan bersifat mengikat terhadap kegiatan-kegiatan sosio-politik umat Islam. Nilai-nilai tersebut secara perenial, integral dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan kemerdekaan yang kesemuanya itu menempati posisi sentral dalam ajaran moral Al-Qur'an.²⁸

Menurut Syafi'i Maarif agama dan negara adalah sebuah konsepsi Simbiosis Mutualisme. Islam membutuhkan instrumen yang disebut negara. Negara dibutuhkan guna menyokong agama. Bagi Ahmad Syafi'i Maarif, negara merupakan alat yang penting bagi agama. Namun demikian, agama (Islam) tidak harus atau dijadikan dasar negara. Aspirasi politik hendaknya bukan menjadikan Islam sebagai dasar negara dan memformalisasikan Syariat Islam, akan tetapi menjalankan kehidupan atas dasar kebersamaan dan musyawarah (*syûrâ*). Hal ini sejalan dengan pesan Al-Qur'an yang menghendaki terciptanya masyarakat yang egaliter dengan menjalankan mekanisme *syûrâ* (mutual consultation).

Pandangan teo-politiknya, Syafi'i Maarif lebih menekankan pencapaian nilai-nilai substantif Islam semisal keadilan, persamaan, kebebasan, kesejahteraan, dan seterusnya ketimbang memformalisasikan Islam menjadi dasar negara. Dengan mengutip nasehat Bung Hatta, ia mengajak umat Islam untuk lebih mengedepankan nilai-nilai substansial Islam :

²⁷ Jajang Jahroni, "Khilafah Islam: Khilafah yang Mana?" dalam Abd. Moqsith Ghazali, dkk. 2005," *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis*, t.t. Hlm.85-87

²⁸ Asroni, "Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Negara dan Syariat Islam di Indonesia."Hlm.363-364

Pakailah garam, terasa tapi tidak kelihatan, dan jangan menggunakan gincu, kelihatan tapi tidak terasa. Artinya, kalau menurut filsafat garam, ajaran Islam diharapkan dapat mewarnai cara bertindak, berpikir, dan merasa, meski tidak diformalisasikan. Dampaknya pun, menurut saya, jauh lebih baik, karena akan terjadi internalisasi nilai-nilai. Yang demikian ini, lebih melihat isi daripada kulit. Karena itu, nasehat Bung Hatta patut direnungkan kembali, sehingga kita dapat membaca realitas lebih tepat lagi.²⁹

Bagi Syafi'i Maarif, negara dan atribut yang disandangnya bukanlah masalah yang fundamental dalam Islam. Dengan kata lain, apapun bentuk negara tidak masalah, yang penting pemerintah bisa mewujudkan kemaslahatan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai substansial Islam lainnya bagi rakyat. Kekuasaan harus dibangun di atas landasan etik-moral. Ia menuturkan "kekuasaan semestinya menjadi kendaraan moral atau alat moral yang efektif untuk tegaknya moral. Jangan dibalik, di banyak negara agama atau moral yang dijadikan kendaraan untuk mencapai kekuasaan." Dalam landasan prinsip-prinsip moral inilah, prinsip-prinsip Islam yang lain dapat ditegakkan dengan mantap.³⁰

KESIMPULAN

Pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif tentang relasi agama dan negara sejatinya terjadi transformasi dari konsep fundamental sebelum beliau berguru dengan Fazlur Rahman. Setelah transformasi dari fundamentalis kepada pemikiran yang modernis itu terjadi, Ahmad Syafi'i Maarif memiliki paradigma simbiotik terhadap relasi agama dan negara.

Islam membutuhkan instrumen yang disebut negara. Negara dibutuhkan guna menyokong agama. Bagi Ahmad Syafi'i Maarif, negara merupakan alat yang penting bagi agama. Namun demikian, agama (Islam) tidak harus atau dijadikan dasar negara. Artinya konsep simbiotik mutualisme atau saling memerlukan antara agama dan negara menjadi paradigma yang dikemukakan oleh Syafi'i

²⁹ Muhammad Alkaf, "Demokrasi Yang Berkeadaban Ahmad Syafii Maarif," *Merawat Kewarasan Publik*, t.t., 42. Hlm.107

³⁰ Asroni, "Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Negara dan Syariat Islam di Indonesia."

Maarif. Paradigma simbiotik ini menjadikan sebuah konsepsi apapun bentuk negara tidak masalah, yang penting pemerintah bisa mewujudkan kemaslahatan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai substansial Islam lainnya bagi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkaf, Muhammad. "Demokrasi Yang Berkeadaban Ahmad Syafii Maarif." *Merawat Kewarasan Publik*, t.t., 42.
- Asroni, Ahmad. "Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Negara dan Syariat Islam di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 10, no. 2 (2011).
- Damanhuri, Damanhuri. "ISLAM, KEINDONESIAAN, DAN KEMANUSIAAN (TELAAH PEMIKIRAN AHMAD SYAFII MAARIF)." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2016).
- Jahroni, Jajang. "Khilafah Islam: Khilafah yang Mana?" dalam Abd. Moqsith Ghazali, dkk. 2005." *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis*, t.t.
- Kamseno, Sigit. "Komprehensivisme Dîn al-Islâm: Kritik atas Konsep Kulturalisme dan Strukturalisme Islam." *dalam Jurnal Politik Islam* 1, no. 2 (2006): 1427.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan: sebuah refleksi sejarah*. PT Mizan Publika, 2009.
- . *Islam dan masalah kenegaraan: studi tentang percaturan dalam konstituante*. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1985.
- . *Mencari Autentitas dalam Dinamika Zaman*. IRCiSoD, 2019.
- . *Titik-titik kisar di perjalananku: autobiografi Ahmad Syafii Maarif*. PT Mizan Publika, 2009.
- Putra, Arie. "Potret Intelektual Muslim: Sebuah Tinjauan Sosiologi Pengetahuan terhadap Pemikiran Ahmad Syafii Maarif." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 2014, 47–73.
- Qorib, Muhammad. "Ahmad Syafii Maarif: Kajian Sosial-intelektual dan Model Gagasan Keislamannya." *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2017).
- Raillon, François. "Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang percaturan dalam Konstituante." *Archipel* 33, no. 1 (1987): 216–217.

- Rakhmat, Jalaluddin. "Islam Alternatif, Ceramah-ceramah di Kampus, cet." *Ketiga*. Jakarta: Penerbit Mizan 26 (2004).
- Sholikin, Ahmad. "Pemikiran Politik Negara Dan Agama 'Ahmad Syafii Maarif.'" *Universitas Airlangga*, 2013.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan tata negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Penerbit Universitas Indonesia, 1990.
- Widayati, Heni Wahyu. "Dialog Pemikiran tentang Islam dan Negara di Indonesia Masa Awal Kemerdekaan." *Jurnal Dakwah* 10, no. 2 (2009): 213–228.
- Zaprulkhan, Zaprulkhan. "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 105–132.